

DEMOKRASI TERPIMPIN SEBUAH KONSEPSI PEMIKIRAN SOEKARNO TENTANG DEMOKRASI

Oleh

Himawan Indrajat^{*)}

**) Staf Pengajar Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung*

ABSTRACT

This study analyze about a democracy concept which is developed by President Soekarno in 1950-1959, in that era is implementation parliamentary democracy in Indonesia. President Soekarno disappointment on the implementation parliamentary democracy was state in his spech which titled "Menyelematkan Republik Proklamasi" on february 21st 1957, Soekarno gave an idea named President Concept. It said that the experienced during 11 years with liberal or was not suitable with Indonesian personality. Because liberal democracy is import from the west. And in this sistem there is a known term about opposition. This term makes Indonesia suffered because it translate into contra with all goverment policy. The proper kabinet for Indonesia is gotong royong kabinet which consist off all people element, not like kabinet in parliamentary democracy. In his previous speech at general meeting "Merah Putih" Soekarno gaven a clue and tell his ambition to take a part to the goverment before constituent assembly finishe the new constitution. Soekarno also said that he will give the consept which is possible for him to take part in goverment although Indonesia still used parliamentary democracy. Beside the dissapointment of implementation liberal or parliamentary democracy, he also dissapointed because his position as President is only symbol. As we know that indonesia goverment sistem has change on november 14th November 1945 from presidentialism in to parliamentary sistem, as an effort to show Soekarno-Hatta goverment is not a japan puppet. And the impact the position Soekarno as president changed not as a head of goverment but as a head of state. The position head of goverment is in prime minister. Based on the issue that makes Soekarno create a democracy concept which is appropriate with the personality of Indonesia people and an effort Soekarno to restore his legitimacy and authority as a president.

Keywords: Parliamentary democraton

Pendahuluan

Konsepsi mengenai demokrasi dalam studi Ilmu Politik sangat sering dibahas, karena demokrasi berkaitan erat dengan terjadinya distribusi kekuasaan dalam hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah atau antara suatu pemerintahan dengan rakyatnya. Namun demokrasi bukan sekedar distribusi kekuasaan, tetapi suatu keharusan dalam memenuhi kriteria keadilan dan moral dalam kehidupan bernegara. Hal ini senada dengan

Soebiantoro (1998) yang mengemukakan bahwa: “argumen pokok dari demokrasi adalah rakyat mempunyai kekuasaan, dan pemerintah diberi mandat oleh rakyat (dengan demikian mempunyai kekuasaan) untuk menjalankan pemerintahan” (Soebiantoro, 1998, p. 113).

Demokrasi di Indonesia sendiri secara formal sudah berjalan selama 61 tahun semenjak Indonesia merdeka. Perkembangan pelaksanaan demokrasi juga mengalami pasang surut dimulai pada pelaksanaan demokrasi masa revolusi kemerdekaan dengan sistem Presidensial dimana Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dimulai pada tanggal 22 Agustus 1945, tetapi pada tanggal 14 November 1945 demokrasi sistem Presidensial diubah dengan sistem parlementer maka jabatan kepala negara yaitu Presiden dipisahkan dari jabatan kepala pemerintahan Perdana Menteri. Perubahan sistem pemerintahan dilakukan untuk menghapus citra negatif di luar negeri bahwa pemerintahan Soekarno adalah pemerintahan boneka Jepang, dan lagi melalui maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945 telah mendukung lahirnya sistem parlementer maklumat tersebut berisi tentang pembentukan partai-partai politik, maka pemerintahan yang terbentuk adalah pemerintahan parlementer dengan koalisi multi partai bertanggung jawab pada KNIP atau *ministerial responsibility* (Budiardjo, 1998).

Kemudian perkembangan selanjutnya adalah demokrasi parlementer antara tahun 1950-1959 berdasarkan Undang-Undang Sementara tahun 1950. Dalam periode ini partai-partai politik berpeluang berkembang secara maksimal, peranan parlemen yang sangat tinggi, dan melaksanakan Pemilu pertama pada tahun 1955 yang sangat demokratis. Tetapi kelemahan pada demokrasi parlementer adalah tidak adanya partai yang berkuasa mutlak sehingga yang terjadi adalah koalisi kabinet yang sangat rapuh yang mengakibatkan tidak berjalannya proses pembangunan, kemudian periode demokrasi dipimpin antara tahun 1959-1965, periode ini merupakan proses terbentuknya otoritarianisme karena kekecewaan kepada partai-partai politik dan demokrasi, periode selanjutnya demokrasi pancasila 1965-1998, dan demokrasi masa transisi 1998 – sekarang.

Dalam memahami perkembangan demokrasi di Indonesia, kita dapat melihat bagaimana periodisasi sejarah demokrasi di Indonesia seperti yang sudah di jelaskan secara singkat diatas. Tetapi yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana demokrasi dipimpin dipilih oleh Presiden Soekarno untuk menggantikan periode demokrasi liberal dengan sistem multi partai, sistem ini hanya melahirkan pemerintahan koalisi yang terlalu lemah dan singkat (Mar'iyah, 1988), sehingga membuat tidak bisa terlaksananya program kabinet. Hal penting lainnya yakni kegagalan dewan konsituante yang terdiri dari partai-partai politik untuk menyusun konstitusi yang baru menggantikan UUDS 1950. Tulisan ini mengkaji lebih mendalam latar belakang Presiden Soekarno melaksanakan demokrasi dipimpin dan menjelaskan perihal konsepsi demokrasi dipimpin tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan tentang Demokrasi

Ilmu Politik mengenal dua macam pemahaman tentang demokrasi, yakni pemahaman secara normatif dan pemahaman secara empirik (Gaffar, 1999). Dalam pemahaman secara normatif, kita memahami demokrasi sebagai suatu ide, yaitu sesuatu yang bersifat seharusnya ada, dan didasarkan penilaian baik dan buruk yang bersumber pada pemikiran politik para filosof dan negarawan sejak masa Yunani kuno hingga era modern, Sedangkan demokrasi yang bersifat empiris membahas demokrasi sebagai bentuk

pemerintahan yang dijalankan oleh negara-negara di dunia ini. Demokrasi bukan merupakan sekedar kehendak, gagasan, tujuan, atau cita-cita moral, namun suatu abstraksi yang didasarkan pada kenyataan yang ada pada suatu negara.

Dalam perdebatan mengenai hubungan antara kapitalisme dan demokrasi, tradisi liberal bersikeras bahwa hanya sistem kapitalis yang dapat menyediakan basis kebebasan dan demokrasi. Tradisi Marxis menemukan bahwa kapitalisme harus digantikan dengan sosialisme sebagai basis demokrasi. Pandangan liberal berlaku sepanjang negara-negara nonkapitalis yang menyatakan kesetiannya pada tradisi Marx tidak mampu membangun sistem politik yang dapat diklaim lebih demokratis daripada demokrasi liberal yang berdasarkan pada kapitalisme. Tetapi perdebatan tidak berakhir di sini. Tidak benar bahwa seluruh sistem kapitalis di dunia adalah demokratis. Dan harus ditekankan bahwa seseorang tidak perlu menjadi seorang Marxis untuk melihat bahwa hambatan demokrasi berasal dari ketimpangan ekonomi (Sorensen, 2003).

Maksud penulis mengutip Sorensen (2003) tentang perdebatan demokrasi liberal kapitalis dengan Marxisme tentang demokrasi adalah bagaimana sebuah proses penerjemahan mengenai bentuk demokrasi, sama yang terjadi di Indonesia ketika munculnya demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan demokrasi pancasila. Demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan moderen pada mulanya dilaksanakan melalui pertumbuhan sejarah, tradisi, kebudayaan, dan revolusi sosial ekonomi dan politik di Benua Eropa dan Amerika Utara. Tetapi sejak munculnya negara-negara baru paska Perang Dunia II, dimana demokrasi memenangkan pertarungan dengan fasisme, maka demokrasi menyebar mulai menyebar sampai ke Asia dan Afrika (negara dunia III), tetapi demokrasi yang berjalan di negara dunia III tidak seberhasil seperti di negara asalnya banyak kegagalan yang malah menjerumuskan negara-negara tersebut menjadi negara otoriter. Hal ini semakin menunjukkan bahwa demokrasi berwayuh arti (*ambiguity*). Negara dunia III sering menganggap demokrasi selama ini ditafsirkan menurut kondisi negara barat. Sementara pada saat yang sama mereka tidak mempunyai konsep yang jelas tentang demokrasi dan menyatakan bahwa pemerintahannya adalah demokratis (Soebiantoro, 1998).

Konsep demokrasi sendiri bukanlah konsep yang mudah dipahami, sebab ia memiliki banyak konotasi makna, variatif, evolutif, dan dinamis. Maka tidaklah mudah membuat suatu definisi yang jelas mengenai demokrasi. Demokrasi bermakna variatif karena sangat bersifat interpretatif. Setiap penguasa negara berhak mengklaim negaranya sebagai demokratis, meskipun nilai yang dianut atau praktik politik kekuasaannya amat jauh dari prinsip-prinsip dasar demokrasi (Suhelmi, 2001).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan, dll. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2004). Teknik pengambilan data dengan menggunakan studi pustaka yakni teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, 1988). Data yang digunakan berasal dari data sekunder

berupa buku-buku dan literatur yang membahas konsep pemikiran Soekarno tentang demokrasi dan kemudian dianalisa dengan teori demokrasi.

PEMBAHASAN

Menuju Demokrasi Terpimpin

Seperti kita ketahui bahwa sistem pemerintahan Indonesia mengalami perubahan sistem pemerintaahan pada tanggal 14 November 1945 dari sistem presidensil ke sistem parlementer, sebagai upaya untuk menghapus kesan bahwa pemerintahan Soekarno-Hatta bukanlah boneka Jepang. Akibatnya kedudukan Presiden Soekarno berubah tidak lagi sebagai kepala pemerintahan tetapi hanya sebagai kepala negara, kedudukan kepala pemerintahan di pegang oleh Perdana Menteri, sampai saat pembentukan Republik Indonesia Serikat, ada tiga Perdana Menteri yaitu Sutan Syahrir, Amir Syarifudin, dan Hatta (Magenda, 2005).

Kedudukan Soekarno yang bersifat simbolis berlangsung lama, kendatipun kemerdekaan Indonesia telah diakui oleh dunia internasional. Dalam tahun 1950 terjadi perubahan konstitusi, dimana UUD 1945 diganti dengan UUDS 1950. UUDS 1950 ini berlaku sampai dengan diberlakukannya kembali UUD 1945 pada pertengahan tahun 1959. Sistem politik yang dianut oleh UUDS 1950 ini merupakan demokrasi parlementer sama dengan ketika pada berlakunya sistem parlementer pada tanggal 14 November 1945. Dalam sistem yang demikian, presiden praktis hanya berpangkutangan; posisi inilah yang sering dinamakan Soekarno sebagai tukang stempel. Tentu saja Soekarno tidak menyukai kedudukan demikian, walau itu sesuai dengan konstitusi yang berlaku (Syamsudin, 1988).

Berlakunya sistem parlementer di Indonesia pada tahun 1950 melalui UUDS 1950, ternyata memiliki dua kelemahan pokok. Kelemahan pertama adalah fragmentasi perlemen Indonesia, dimana tidak ada partai mayoritas yang menguasai lebih dari separoh jumlah kursi DPR. akibatnya terjadi proses "*coalition building*" yang mudah pecah karena perbedaan suatu kebijaksanaan. Ini terjadi pada masa revolusi kemerdekaan maupun pada masa DPR sementara, 1950. Hanya setelah terbetuknya DPR hasil pemilu 1955 dapat dibentuk koalisi besar yang terdiri dari PNI, Masyumi dan Nahdatul Ulama. Tetapi karena mudahnya koalisi kabinet pecah, maka umur kabinet juga tidak terlalu lama, antar 6 bulan sampai yang paling lama 2 tahun (Magenda, 2005). Lebih lanjut Magenda (2005) menjelaskan kelemahan lainnya yakni ketika Presiden Soekarno yang sudah tidak sabar kepada kabinet-kabinet yang tidak fokus lagi pada pembangunan nasional, Presiden Soekarno menunjuk dirinya sebagai formatur dan membentuk kabinet karya yang dipimpin Ir. Djuanda.

Situasi politik yang bisa dikatakan kacau saat itu terjadi, hampir di setiap daerah timbul pemberontakan akibat ketidakpuasan kepada pemerintahan pusat. Konflik kekuasaan antara partai-partai politik di parlemen yang saling menjatuhkan satu sama lain, menimbulkan kerisauan dan ketidakpuasan pada Angkatan Darat pada tanggal 17 Oktober 1952 Angkatan Darat dengan mengarahkan meriamnya ke arah Istana Negara. Pimpinan AD saat itu Kolonel A.H. Nasution dalam aksinya tersebut mendesak Soekarno untuk membubarkan parlemen dan mengambil alih kekuasaan; tetapi Soekarno menolaknya, karena Soekarno tidak suka untuk didesak-desak (Syamsudin, 1988).

Menurut Syamsudin (1988) masih terdapat kemungkinan lain kenapa Soekarno tidak mau mengambil kekuasaan selain karena dipaksa. Pertama, ada kemungkinan Soekarno bila

ia mengambil alih kekuasaan maka Soekarno khawatir ia akan mengalami hal yang sama. Kemungkinan tersebut bukanlah hal yang tidak mungkin, karena AD saat itu dipengaruhi oleh perwira-perwira yang dikenal tidak dekat dengan Soekarno. Kedua, walaupun ada keinginan untuk menguasai panggung politik ketika itu, tetapi tampaknya Soekarno belum begitu yakin akan kekuatannya sendiri. Disatu pihak, pada waktu itu Soekarno belum memiliki pengaruh yang cukup luas di kalangan AD, sehingga sangat kecil kemungkinan baginya untuk menguasai organisasi militer ini.

Pada pidatonya tertanggal 21 Februari 1957 dengan Judul “Menyelamatkan Republik Proklamasi”, Soekarno mengeluarkan gagasan yang disebut konsepsi presiden. Soekarno menyatakan bahwa pengalaman selama 11 tahun dengan sistem demokrasi liberal atau parlementer menunjukkan bahwa demokrasi tidak cocok dengan kepribadian Indonesia. Demokrasi tersebut adalah demokrasi Import yang tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia sehingga kita mengalami ekses-ekses dalam penyelenggaraannya. Dalam demokrasi parlementer yang datang dari barat terdapat satu pengertian yang dinamakan oposisi. Oposisi inilah yang membuat kita menderita karena prinsip oposisi diartikan dengan menentang pemerintah secara hebat-hebatan. Kabinet yang sesuai dengan kepribadian Indonesia adalah kabinet gotong royong yang akan terdiri dari semua unsur-golongan yang ada dalam masyarakat. Soekarno juga menyatakan bahwa pemaksaan mayoritas atas minoritas tidak sesuai dengan cara Indonesia, dimana dalam pengambilan keputusan dengan melalui jalan musyawarah untuk mufakat. Selama ada golongan minoritas yang belum yakin akan suatu usul maka musyawarah harus diteruskan dibawah tuntunan seorang pemimpin sampai ditemukan kata sepakat, hal ini memungkinkan semua pendapat dipertimbangkan dengan memperhatikan pendapat minoritas. Inilah yang oleh Soekarno dianggap sebagai model demokrasi Indonesia (Mar’iyah, 1988).

Disini dapat dilihat bagaimana Presiden Soekarno memperlihatkan ketidaksukaannya terhadap demokrasi parlementer yang diterapkan di Indonesia ternyata tidak berjalan secara mulus karena malah menimbulkan ketidakstabilan pada pemerintahan. Soekarno melihat posisi oposisi hanya sebagai pengganggu terhadap kabinet karena hanya melakukan penentangan-penentangan tanpa memberikan solusi atau kesempatan kepada kabinet yang memerintah. Untuk menghindari terjadinya oposisi yang tidak sehat, Soekarno menginginkan terbentuknya suatu kabinet yang di isi oleh semua unsur golongan masyarakat sehingga semua golongan dapat terakomodasi.

Soekarno berusaha menginterpretasikan atau menerjemahkan demokrasi berdasarkan pemahamannya yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Soekarno menginginkan suatu konsep demokrasi ala Indonesia yang lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan gotong royong dibawah tuntunan seorang pemimpin. Bisa dikatakan apa yang di ungkapkan oleh Presiden Soekarno ada benarnya karena menurut MacPherson (Suhelmi, 2001, p. 316) demokrasi liberal hanya akan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang tingkat perkembangan kapitalismenya relatif tinggi dan suatu negara yang mengklaim sebagai negara demokrasi liberal pada mulanya harus bersifat liberala terlebih dahulu baru kemudian demokratis. Ini berlainan dengan kondisi di negara-negara Barat karena nilai-nilai liberalisme telah dianut lebih dahulu oleh masyarakatnya sebelum nilai-nilai demokrasi sehingga negara barat tidak mengalami kesulitan dalam melaksanakan demokrasi.

Sebelum Presiden Soekarno berpidato tanggal 21 Februari 1957 tentang konsepsinya mengenai demokrasi, Presiden Soekarno pada pidatonya tanggal 27 Januari 1957 di rapat umum ”Merah Putih” di Bandung, sudah memberikan isyarat dan mengungkapkan keinginannya untuk mencampuri urusan pemerintahan pada masa peralihan sebelum

konstituante selesai kerja sampai konstituante dapat direalisasikan. Soekarno juga mengemukakan bahwa ia akan mencetuskan konsepsi yang akan memungkinkan ia turut serta dalam pemerintahan (Noer, 1987).

Konsep Demokrasi Terpimpin

Konsepsi Presiden Soekarno tentang demokrasi, sebenarnya memuat tiga hal pokok yang terkandung didalamnya. Pertama, adalah diperkenalkannya gaya kepemimpinan dan sistem pemerintahan baru yang kemudian dikenal dengan sistem demokrasi terpimpin. Kedua untuk mewujudkan konsepsi baru tersebut maka ia mengusulkan pembentukan kabinet gotong royong seperti sudah disinggung diatas dengan memasukan seluruh partai politik termasuk Partai Komunis Indonesia. Ketiga dibentuknya Dewan Nasional yang terdiri dari sebagian besar golongan fungsional, yang dimaksud golongan fungsional adalah golongan karyawan yang terdiri dari wakil buruh, tani, cendekiawan, pengusaha nasional, golongan agama, pemuda, angkatan bersenjata, wanita dan juga wakil-wakil daerah. Dewan Nasional adalah pencerminan dari masyarakat secara keseluruhan (Mar'iyah, 1988).

Usulan pembentukan kabinet gotong royong adalah membentuk kabinet dengan menyertakan seluruh partai termasuk PKI. Karena menurut Soekarno partai ini adalah satu bagian yang sah dari revolusi dan PKI seharusnya diberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembentukan suatu kesepakatan nasional. Dengan demikian akan terbentuk suatu pemerintahan yang terdiri dari PNI, Masyumi, NU dan PKI, dan mungkin akan dibantu oleh partai-partai kecil yang lain. Jadi kabinet yang terbentuk menurut Soekarno akan lebih mampu menjalankan kebijaksanaan politik nasional yang dapat diterima dan meningkatkan kerukunan persatuan nasional daripada suatu kabinet koalisi yang terus diganggu oleh oposisi. Gotong royong menurut Soekarno adalah perkataan asli Indonesia yang menggambarkan jiwa Indonesia yang semurni-murninya (Mar'iyah, 1988).

Salah satu gagasan Soekarno yang lain yaitu penguburan partai-partai politik pada pidatonya tahun 1956 di muka pertemuan delegasi pemuda dari semua parti dan di muka semua Persatuan Guru-guru ia menyatakan bahwa tak seorangpun dapat membenarkan adanya 40 buah partai di negeri ini, dan mengajak kita untuk mengubur partai-partai. Soekarno tidak suka pada sistem multi partai karena terlalu banyak partai malah menimbulkan ketidakstabilan di kabinet dan parlemen. Sebenarnya Soekarno lebih menginginkan terbentuknya satu partai tunggal atau partai pelopor pada awal kemerdekaan tetapi tidak mendapatkan persetujuan dari KNIP karena dikhawatirkan menjadi pesaing KNIP, ditambah munculnya maklumat pemerintah No. X tanggal 3 November 1945 tentang Pembentukan Partai Politik membuat usulan Soekarno menjadi gagal.

Gagasan ini ditentang oleh M. Natsir ketua Masyumi, Natsir menolak pandangan Presiden Soekarno tentang sistem partai dan demokrasi pada umumnya serta konsepsi kepala negara. Dengan perkataannya "bahwa selama demokrasi masih ada, selama itu pula partai-partai terus ada, dengan atau tidak dengan keputusan pemerintah pada bulan November 1945. Sebaliknya, dikatakannya pula, selama masih ada kebebasan partai, selama itu demokrasi ditegakkan. Kalau partai-partai dikubur. Demokrasi otomatis akan terkubur. Dan diatas kuburan ini hanya dikatator yang memerintah. Pada bulan November 1956 Kiai Dahlan menyatakan bahwa penguburan partai-partai bertentangan dengan semangat Islam. Penguburan partai-partai bisa menimbulkan dikatator. Imron Rosyadi, Ketua Pemuda Ansor (NU) mengatakan bahwa dikatator berlawanan dengan Islam. Ia juga menambahkan bahwa sistem pemerintahan harus dikembangkan lepas dari soal siapa Presidennya. Imron Rosyadi

juga menuduh bahwa Dewan Nasional hanya dibentuk untuk kepentingan Soekarno (Noer, 1987).

Setelah seringnya Soekarno mengkritik demokrasi parlementer dan sistem multi partai dengan pidato-pidatonya. Situasi politik yang makin kritis dalam masa tersebut seperti pergolakan dalam badan konstituante dan parlemen, membuka kesempatan bagi Soekarno untuk ikut menyelesaikan masalah yang dihadapi, dengan mengambil tindakan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi sebagai berikut:

1. Pembubaran Konstituante
2. Berlakunya Kembali UUD 1945
3. Tidak berlakunya UUDS 1950
4. Pembentukan MPRS dan DPAS

Akibatnya terjadi pembubaran DPR dan MPR hasil pemilu 1955, digantikan dengan MPR Sementara dan DPR Gotong Royong yang anggotanya diangkat oleh Presiden Soekarno. Demikian juga pimpinan MPR Sementara dan DPR Gotong Royong diangkat sebagai menteri kordinator dan menteri dalam kabinet.

Sedangkan usaha Presiden Soekarno untuk menyederhanakan sistem partai politik dengan mengurangi jumlah partai politik melalui Perpres No. 7/1959 yang membatalkan maklumat pemerintah tentang pembentukan partai politik tanggal 3 November 1945, diganti dengan partai-partai politik harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi agar diakui pemerintah. Hanya 10 partai yang memenuhi syarat tersebut yaitu PKI, PNI, NU, Partai Katolik, Partindo, Parkindo, Partai Murba, PSII Arudji, IPKI, Partai Islam Perti, sedangkan partai lain tidak memenuhi syarat, termasuk PSI dan Masyumi yang dituduh terlibat pemberontakan PRRI/PERMESTA (Budiardjo, 1998).

Untuk mewadahi 10 partai tersebut maka dibentuklah Front Nasional, yang berdasarkan NASAKOM (Nasionalis, Agama dan Komunis) ditambah golongan fungsional termasuk militer. PKI berhasil mengembangkan pengaruhnya untuk melemahkan kedudukan partai politik. Tetapi akibatnya dalam perpolitikan nasional malah terjadi persaingan baru dan sebuah segitiga kekuatan politik yaitu Presiden Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI.

Antara Angkatan Darat dan PKI memiliki tujuan yang berbeda, Presiden Soekarno turun sebagai kekuatan penyeimbang diantar persaingan tersebut untuk menjaga agar konsep demokrasi terpimpinnya dan nasakom tetap berjalan. Tetapi tidak berhasil karena adanya upaya PKI melalui Gestapu untuk menyingkir Angkatan Darat, tapi Angkatan Darat lebih siap menghadapinya, malah menyebabkan demokrasi terpinpin gagal dan Presiden Soekarno tersingkir dari kekuasaan (Budiardjo, 1998).

Konsep demokrasi terpinpin Soekarno menurut Takashi Shirasi (Sularta, 2001, p. 70) dipengaruhi oleh pemikiran yang berkembang pada nasionalis generasi pertama seperti yang diwakili Soetatmo, Tjipto, dan Ki Hajar Dewantara. Pengaruh Tjipto terhadap Soekarno adalah perlunya *national spirit* menjadi *national will* yang akhirnya akan mewujudkan dalam bentuk aksi nasional. Sedangkan pengaruh Soetatmo di dapatnya dari konsep demokrasi dan *leaderschap* (kepemimpinan) dari Ki Hadjar Dewantara, yang sangat dipengaruhi oleh visi Soetatmo mengenai negara kekeluargaan di bawah kendali Bapak/yang bijaksana/*pandhita ratu*.

Soetatmo adalah seorang anggota Budi Oetomo, yang dalam bukunya "Sabdo Pandito Ratu" Soetatmo menuliskan bahwa sistem politik yang sedang berjalan di Indies (Sebutan Indonesia ketika masih di jajah Belanda) tidak benar. Ia membandingkan negara Indies dengan sebuah keluarga yang "bapaknya cerewet dan ibunya sibuk mengurus diri

sendiri, sehingga lupa tugasnya terhadap anak-anak”. “*Jika ibu terus menerus menolak tugasnya, kecelakaan tidak terhindarkan. Dan ketika kecelakaan terjadi, anak-anak adalah pemenangnya. Aturan akan kacau, sebagai akhir bapak dan ibu harus menaatinya. Dan itulah gambaran negara yang berlandaskan demokrasi*” (Sularta, 2001, p. 70).

Soetatmo sangat mengerti bahwa gelombang yang menuju negara demokratis tak terhindarkan. Ia juga memperhatikan dengan sedih orang-orang menerima dengan penuh antusias datangnya demokrasi. Namun dia percaya bahwa *volksregeering* atau pemerintahan rakyat yaitu demokrasi adalah ilusi. Karena “*Jika setiap individu memiliki hak yang sama, mereka tak punya tugas untuk dipenuhi, setiap individu bersandar pada dirinya, haknya sendiri dan tak ada masyarakat yang mungkin bertahan. Anak-anak akan mengurus dirinya sendiri, karena mereka menekankan bahwa setiap orang harus menghormati haknya. Tak akan ada persatuan sama sekali, tetapi hanya perbedaan, tak ada keteraturan tetapi kekacauan*” (Sularta, 2001, p. 70).

Jalan keluar dari semua itu menurut Soetatmo melalui pembinaan moral adalah kuncinya. Ia melihat *opvoeding* yang diberikan *pandita-ratoe* sebagai jalan dan kunci untuk perkembangan kebudayaan Jawa maupun jawaban atas demokrasi. Ia mengatakan bahwa pembina moral harus diarahkan oleh pandita yang sangat mengerti aturan tertinggi, demokrasi harus diarahkan pandita-ratu yang bijaksana. Atau dengan kata lain, “*apa yang dikatakan bapak itu baik, karena bapak itu benar! Itulah keluarga ideal, begitu juga negara.*” Adalah Bapak/ yang bijaksana/*pandita ratoe/* yang mesti mengarahkan demokrasi dan perkembangan kebudayaan Jawa. Pemikiran Soetatmo inilah yang mempengaruhi Ki Hajar Dewantara mengenai *opvoeding* (pembinaan/tut wuri handayani). Negara kekeluargaan dan pandita ratu yang bijaksana memberi landasan pada teori Ki Hajar Dewantara tentang demokrasi dan *leiderschap* (kepemimpinan), yang kemudian diwarisi oleh Soekarno dalam rumusannya yang tertuang dalam demokrasi terpimpin (Sularta, 2001, p. 71).

Tetapi Tjipto Mangoenkosoemo sebagai demokrat sejati tidak setuju dengan pendapat Soetatmo, dalam pandangan Tjipto, Soetatmo tidak mengerti sejarah perkembangan dunia. Tidak diragukan bahwa Indies terdiri dari berbagai kelompok etnis yang berbeda dalam budaya dan bahasanya seperti yang dikatakan Soetatmo. Tetapi Jawa sudah lama kehilangan kedaulatannya dan menjadi bagian dari Hindia Belanda yaitu Indies. Tanah air orang Jawa bukan lagi Jawa, tetapi Indies dan adalah tugas pemimpin nasional untuk merumuskan nasionalisme Indies. Tjipto lantas menggambarkan nation untuk Indies (sebutan untuk orang Indies) sebagai landasan masa depan Indies merdeka (Sularta, 2001, p. 72). Inilah yang mengilhami Soekarno dengan *national spirit* yang kemudian menjadi *national will* dalam bentuk aksi nasional.

KESIMPULAN

Soekarno sebagai Presiden kehilangan kekuasaannya dan hanya menjadi symbol pemersatu bangsa saja, sejak berlakunya maklumat pemerintah pada tanggal 14 november 1945, yang mengubah sistem pemerintahan dari presidensil menjadi parlementer yang berlanjut hingga berlakunya UUDS 1950 sampai bulan Juli tahun 1959. Soekarno tidak mampu berbuat banyak ketika terjadi kejatuhan cabinet, pemberontakan di daerah, konflik antar partai politik karena sistem multi partai yang sebenarnya tidak disenangi oleh Soekarno, Soekarno lebih suka satu partai tunggal yang akan menciptakan persatuan dan

kesatuan nasional. Soekarno melihat sistem demokrasi parlementer dari barat tidak cocok diterapkan di Indonesia. Soekarno lebih tertarik akan sistem demokrasi rakyat yang tidak didasarkan perbedaan kelas dalam masyarakat, dan suatu demokrasi terpimpin dengan seorang pemimpin yang akan mengarahkan rakyat dalam berdemokrasi agar tidak terjadi kekacauan seperti ketika demokrasi parlementer berlangsung. Soekarno terlalu menyederhanakan permasalahan bahwa semuanya dapat disatukan oleh seorang pemimpin yang kuat dan semua organisasi social politik dapat disatukan, padahal mereka memiliki kepentingan yang berbeda dan pasti saling bersaing untuk memenangkan kepentingannya. Contohnya persaingan antara PKI dan AD yang malah menghancurkan demokrasi terpimpin itu sendiri dan menyingkirkan Soekarno dari kekuasaan. Ternyata konsep demokrasi terjemaahan Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya gagal total, Soekarno tidak melihat realitas politik yang terjadi di Indonesia. Memang demokrasi parlementer juga gagal diterapkan di Indonesia tetapi itu dikarenakan perekonomian Indonesia belum mapan, sehingga terjadinya pergantian kabinet yang menciptakan ketidakstabilan politik dan rakyat Indonesia saat itu belum siap melaksanakan demokrasi parlementer karena sebagai bangsa yang baru merdeka masih mengalami periode transisi. Tetapi konsepsi demokrasi terpimpin Soekarno malah menciptakan kediktatoran dan otoritarianisme, karena anggapan Soekarno bahwa rakyat memerlukan bimbingan, pembinaan, dan arahan dalam berdemokrasi oleh seorang pemimpin yang mengerti aturan tertinggi. Alih-alih menciptakan demokrasi tetapi malah membuat Soekarno sebagai Presiden sama sekali tidak terkontrol oleh rakyat sehingga Soekarno cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Seperti yang dikatakan oleh Lord Acton "*Power Attends To Corrupt*". Demokrasi tidak dapat terbangun, malah konsep Soekarno sendirilah yang menjadi penyebab kejatuhan pemerintahan Soekarno.

SARAN

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia mengalami periode uji coba untuk mencapai konsolidasi demokrasi pada masa sekarang ini. Pada awal kemerdekaan tahun 1945, untuk menghindari kesan sebagai negara boneka buatan Jepang, para *founding father* merubah sistem presidensial menjadi sistem parlementer yang kemudian disusul dengan berdirinya partai politik di Indonesia untuk mendukung sistem parlementer. Tetapi pelaksanaan demokrasi parlementer ternyata membuat ketidakstabilan politik karena sering terjadinya pembubaran kabinet yang berakibat pada terhambatnya pembangunan di Indonesia. Dekrit presiden yang dikeluarkan Presiden Soekarno malah membuat kemunduran demokrasi di Indonesia. Kemudian setelah rezim Soekarno jatuh digantikan Soeharto demokrasi di Indonesia juga tidak mengalami kemajuan, baru setelah Soeharto mundur dari kursi kekuasaan Indonesia bisa merasakan demokrasi yang sesungguhnya melalui kepemimpinan Habibie yang mempersiapkan pemilu untuk membentuk pemerintahan baru. Sehingga akhirnya kita merasakan kondisi demokrasi seperti sekarang ini, dari pemilu multi partai, pemilihan Presiden langsung, otonomi daerah, pemilihan kepala daerah langsung dan kebebasan pers. Kita harus terus mendukung pelaksanaan demokrasi ini yang menitikberatkan pada keseimbangan kekuasaan melalui mekanisme check and balance jangan sampai eksekutif atau legislatif terlalu kuat. Bila salah satu pihak menjadi kuat akibatnya terjadi penyalahgunaan kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam (Editor). (1998). *Partisipasi dan partai politik*, edisi revisi. Jakarta: YOI.
- Gaffar, Afan. (1999) *Politik Indonesia transisi menuju demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Magenda, Burhan DR. (5 April 2005) *Makalah hubungan eksekutif dan legislatif yang kondusif untuk stabilitas politik dan pembangunan nasional* (kuliah dan ceramah umum pada kursus singkat angkatan XIII LEMHANAS di Jakarta).
- Nazir, M. (1988). *Metode penelitian*. Jakarta: PT. Ghalia.
- Noer, Delia. (1987). *Partai Islam di pentas nasional*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Syamsudin, Nazarudin Editor. (1988). *Soekarno pemikiran politik kenyataan dan praktek*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Sorensen, George. (2003). *Demokrasi dan demokratisasi proses dan prospek dalam sebuah dunia yang sedang berubah*. Terj. I Made Krisna, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soebiantoro, M. dkk. (1998). *Pengantar ilmu politik*. Purwokerto: Unsoed.
- Suhelmi, Ahmad. (2001). *Pemikiran politik barat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sularta, ST (Editor). (2001). *Soekarno dalam dialog dengan sejarah Soekarno seratus tahun*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

